



REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT BULAN **JULI** 2014

TINGKAT KUASA BUN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
PANGKAL PINANG



Agustus 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GRAFIK	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT	
I LAPORAN ARUS KAS.....	4
II NERACA KUN.....	6
III LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	7
IV NERACA SAU.....	8
V CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
A. PENDAHULUAN.....	9
A.1 DASAR HUKUM.....	9
A.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN.....	9
A.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	9
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS.....	14
B.1 IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS.....	14
B.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS.....	14
B.3 CATATAN PENTING LAINNYA.....	19
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	20
C.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM.....	20
C.2 PENJELASAN PER POS NERACA.....	20
C.3 CATATAN PENTING LAINNYA.....	21
D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI APBN.....	22
D.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN	22
D.2 PENJELASAN PER POS REALISASI APBN	22
D.3 CATATAN PENTING LAINNYA.....	26
E. CATATAN PENTING LAINNYA	27
VI ANALISA LAPORAN	
ANALISA INTERN LAPORAN.....	30
ANALISA ANTAR LAPORAN.....	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Isi Laporan Keuangan KPPN Pangkal Pinang selaku UAKBUN-D yang terdiri dari (i) Laporan Arus Kas, (ii) Neraca KUN, (iii) Laporan Realisasi Anggaran, dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Juli 2014 Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.



Pangkal Pinang, 12 Agustus 2014
Kepala KPPN Pangkal Pinang

Muhammad Budi Dharmanto
NIP. 197304241998031004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Pasal 30 ayat (2) undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Laporan Keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan Keuangan perusahaan negara dan badan lainnya

Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Laporan Arus Kas

1. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas hingga Tahun 2014, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Juli 2014 pada tingkat kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN Pangkal Pinang.

Saldo akhir Kas per 31 Juli 2014 adalah sebesar Rp. 26.740.260.510,- yang berarti terdapat kenaikan kas sebesar Rp. 10.875.759.266,- dari saldo 1 Januari 2013 sebesar Rp. 15.864.501.244,-. Kenaikan saldo Kas tersebut berasal dari aktivitas operasi sebesar Rp. 561.198.162.669,-; aktivitas investasi non keuangan sebesar Rp. -234.822.366.896,-; aktivitas pembiayaan sebesar Rp. 0,-; dan aktivitas non anggaran sebesar Rp. -315.500.036.507,-.

Neraca

2. NERACA

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Kas Umum Negara, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011.

Jumlah Aset per 31 Juli 2014 dicatat sebesar Rp. 411.443.945.148,- dalam bentuk aset lancar saja.

Jumlah Kewajiban yang berupa Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar Rp. 69.384.497.048,- dibukukan sebagai Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp. 68.606.211.043,- dan Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 778.286.005

Jumlah Ekuitas Dana dicatat sebesar Rp. 342.059.448.100,- yang berupa SAL dan SILPA.

Laporan Anggaran

Realisasi

3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Juli 2014, menggambarkan realisasi hingga Tahun 2014, transaksi mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi Pendapatan dan Hibah hingga Tahun 2014 sebesar Rp. 1.176.383.125.082,- berasal dari: Penerimaan Perpajakan Rp. 926.564.373.000,-; Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp. 249.818.752.082,-; dan dari Penerimaan Hibah sebesar Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Negara hingga Tahun 2014 sebesar Rp. 850.007.329.309,-. Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 850.007.329.309,- dan Transfer ke Daerah sebesar Rp. 0,-. Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas Belanja Pegawai Rp. 267.291.570.857,-; Belanja Barang Rp. 301.514.845.957,-; Belanja Modal Rp. 234.931.468.170,-; Belanja Bantuan Sosial Rp. 46.269.444.325,-; dan Belanja Lain-lain Rp. 0,-.

Transfer ke Daerah terdiri atas Dana Perimbangan sebesar Rp. 0,-.

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir per tanggal 31 Juli 2014, pendapatan Negara dan hibah, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu kas diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari KPPN.

Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KPPN.

LAPORAN ARUS KAS
TINGKAT KUASA BUN KPPN Pangkal Pinang
PERIODE SAMPAI DENGAN 31 Juli 2014
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Jumlah
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
I. Arus Kas Masuk		
Pendapatan Negara dan Hibah		
1. Penerimaan Perpajakan	B.2.1	926.564.373.000
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.2	249.709.650.808
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.2.1	33.998.485.905
b. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	B.2.2.2	184.151.046.300
c. Penerimaan PNPB Lainnya	B.2.2.3	31.560.118.603
3. Pendapatan Hibah	B.2.3	0
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		1.176.274.023.808
II. Arus Kas Keluar		
II.a Belanja Pemerintah Pusat		
1. Belanja Pegawai	B.2.4	267.291.570.857
2. Belanja Barang	B.2.5	301.514.845.957
3. Belanja Modal	B.2.6	0
3. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang (Denda)	B.2.6.1	0
4. Belanja Utang	B.2.7	0
5. Subsidi	B.2.8	0
6. Hibah	B.2.9	0
7. Bantuan Sosial	B.2.10	46.269.444.325
8. Belanja Lain-lain	B.2.11	0
II.b Transfer Ke Daerah		0
1. Dana Perimbangan	B.2.12	0
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang	B.2.13	0
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		615.075.861.139
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		561.198.162.669
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
I. Arus Kas Masuk		
Penjualan Aset		
a. Penjualan Aset Tetap	B.2.14	109.101.274
b. Penjualan Aset Lainnya	B.2.15	2.620.274
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		109.101.274
II. Arus Kas Keluar		
Belanja Modal		
a. Belanja Modal untuk Tanah	B.2.16	142.000.000
b. Belanja Modal untuk Peralatan Mesin	B.2.17	10.338.682.341
c. Belanja Modal untuk Gedung dan Bangunan	B.2.18	14.858.015.762
d. Belanja Modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan	B.2.19	204.484.435.167
e. Belanja Modal untuk Fisik Lainnya	B.2.21	5.108.334.900
f. Belanja Modal untuk Badan Layanan Umum	B.2.22	0
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		234.931.468.170
Arus Kas Bersih Dari Akt. Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)		(234.822.366.896)

LAPORAN ARUS KAS
TINGKAT KUASA BUN KPPN Pangkal Pinang
PERIODE SAMPAI DENGAN 31 Juli 2014
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Jumlah
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
I. Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Non Perbankan		0
a. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	B.2.23	0
Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri		
b. Penarikan Pinjaman Program	B.2.24	0
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		0
II. Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri		0
a. Belanja Pengeluaran Surat Utang Negara/Obligasi	B.2.25	0
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri		
b. Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.26	0
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		0
Arus Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan (C.I - C.II)		0
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
I. Arus Kas Masuk		
1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	B.2.27	72.809.314.809
2. Penerimaan Kiriman Uang	B.2.28	1.077.789.614.169
3. Penerimaan Transito	B.2.29	56.440.041.141
4. Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	B.2.30	2.604.074.698
Jumlah Arus Kas Masuk (D.I)		1.209.643.044.817
II. Arus Kas Keluar		
1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	B.2.31	4.203.103.766
2. Pengeluaran Kiriman Uang	B.2.32	1.434.989.436.506
3. Pengeluaran Transito	B.2.33	82.935.905.250
4. Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	B.2.34	3.014.635.802
Jumlah Arus Kas Keluar (D.II)		1.525.143.081.324
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran (D.I - D.II)		(315.500.036.507)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS (A+B+C+D)		10.875.759.266
AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN		0
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN		10.875.759.266
SALDO AWAL KAS	B.1	15.864.501.244
SALDO AKHIR KAS	B.1	26.740.260.510

NERACA KAS UMUM NEGARA (KUN)
TINGKAT KUASA BUN KPPN Pangkal Pinang
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Juli 2014
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Jumlah
ASET		
ASET LANCAR	C.2.1	411.443.945.148
Kas dan Bank		
Rekening Kas di KPPN	C.2.1.1	26.740.260.510
Kas dalam Transito	C.2.1.2	357.199.822.337
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.3	27.503.862.301
JUMLAH ASET LANCAR		411.443.945.148
JUMLAH ASET		411.443.945.148
KEWAJIBAN	C.2.2	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		69.384.497.048
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	C.2.2.1	68.606.211.043
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.2.2	778.286.005
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		69.384.497.048
JUMLAH KEWAJIBAN		69.384.497.048
EKUITAS DANA LANCAR	C.2.3	342.059.448.100
SAL	C.2.3.1	15.683.652.327
SILPA	C.2.3.2	326.375.795.773
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		342.059.448.100
JUMLAH EKUITAS DANA		342.059.448.100
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		411.443.945.148

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT KUASA BUN KPPN Pangkal Pinang
PERIODE YANG BERAKHIR 31 Juli 2014
(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGG.	%
A. Pendapatan Negara dan Hibah	D.2.1	599.700.428.507	1.176.383.125.082	576.682.696.575	
I. Penerimaan Dalam Negeri	D.2.1.1	599.700.428.507	1.176.383.125.082	576.682.696.575	196,16%
1. Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1.1	568.632.679.639	926.564.373.000	357.931.693.361	61,37%
a. Pajak Dalam Negeri	D.2.1.1.1.1	568.632.679.639	921.184.088.400	352.551.408.761	61,73%
b. Pajak Perdagangan Intl.	D.2.1.1.1.2	0	5.380.284.600	5.380.284.600	0,00%
2. PNPB	D.2.1.1.2	31.067.748.868	249.818.752.082	218.751.003.214	804,11%
a. Penerimaan SDA	D.2.1.1.2.1	0	33.998.485.905	33.998.485.905	0,00%
b. Bag.Pem. Atas Laba BUMN	D.2.1.1.2.2	0	184.151.046.300	184.151.046.300	0,00%
c. PNPB Lainnya	D.2.1.1.2.3	31.067.748.868	31.669.219.877	601.471.009	101,94%
II.Penerimaan Hibah	D.2.1.2	0	0	0	0,00%
Jmlh Pdptan Negara & Hibah (A.I+A.II)		599.700.428.507	1.176.383.125.082	576.682.696.575	196,16%
B. Belanja Negara	D.2.2	1.884.238.958.000	850.007.329.309	(1.034.231.628.691)	45,11%
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	1.884.238.958.000	850.007.329.309	(1.034.231.628.691)	45,11%
Belanja Pegawai	D.2.2.1.1	455.240.755.000	267.291.570.857	(187.949.184.143)	58,71%
Belanja Barang	D.2.2.1.2	720.581.879.000	301.514.845.957	(419.067.033.043)	41,84%
Belanja Modal	D.2.2.1.3	579.003.557.000	234.931.468.170	(344.072.088.830)	40,58%
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang(Denda)	D.2.2.1.3.1	0	0	0	0,00%
Pembayaran Bunga Utang	D.2.2.1.4	0	0	0	0,00%
Subsidi	D.2.2.1.5	0	0	0	0,00%
Hibah	D.2.2.1.6	0	0	0	0,00%
Bantuan Sosial	D.2.2.1.7	129.412.767.000	46.269.444.325	(83.143.322.675)	35,75%
Belanja Lain-lain	D.2.2.1.8	0	0	0	0,00%
II.Transfer ke Daerah	D.2.2.2	0	0	0	#DIV/0!
1. Dana Perimbangan	D.2.2.2.1	0	0	0	#DIV/0!
a. Dana Bagi Hasil	D.2.2.2.1.1	0	0	0	#DIV/0!
b. Dana Alokasi Umum	D.2.2.2.1.2	0	0	0	0,00%
c. Dana Alokasi Khusus	D.2.2.2.1.3	0	0	0	0,00%
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	D.2.2.2.2	0	0	0	0,00%
a. Dana Otonomi Khusus	D.2.2.2.2.1	0	0	0	0,00%
b. Dana Penyesuaian	D.2.2.2.2.2	0	0	0	0,00%
Jumlah Belanja Negara (B.I+B.II)		1.884.238.958.000	850.007.329.309	(1.034.231.628.691)	45,11%
C. Surplus/ Defisit Anggaran (A-B)	D.2.3	(1.284.538.529.493)	326.375.795.773	1.610.914.325.266	-25,41%
D. Pembiayaan	D.2.4	0	0	0	0,00%
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	0	0	0	0,00%
1. Perbankan Dalam Negeri	D.2.4.1.1	0	0	0	0,00%
2. Non-perbankan Dalam Negeri	D.2.4.1.2	0	0	0	0,00%
a. Privatisasi	D.2.4.1.2.1	0	0	0	0,00%
b. Penj. Aset Program Restruk. Perbankan	D.2.4.1.2.2	0	0	0	0,00%
c. Surat Utang Negara	D.2.4.1.2.3	0	0	0	0,00%
d. Penyertaan Modal Negara	D.2.4.1.2.4	0	0	0	0,00%
II. Pembiayaan Luar Negeri	D.2.4.2	0	0	0	0,00%
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	D.2.4.2.1	0	0	0	0,00%
a. Pinjaman Program	D.2.4.2.1.1	0	0	0	0,00%
b. Pinjaman Proyek	D.2.4.2.1.2	0	0	0	0,00%
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	D.2.4.2.2	0	0	0	0,00%
Jumlah Pembiayaan Negara (D.I+D.II)		0	0	0	0,00%
E. SILPA/SIKPA Tahun ini (D+C)	D.2.5		326.375.795.773		
F. Sisa Anggaran Lebih (SAL) s/d TA 2010			15.683.652.327		
G. Sisa Anggaran Lebih (SAL) s/d TA ini (E+F)			342.059.448.100		

NERACA SISTEM AKUNTANSI UMUM (SAU)
TINGKAT KUASA BUN KPPN Pangkal Pinang
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Juli 2014
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Jumlah
ASET		
ASET LANCAR	C.2.4	27.503.862.301
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4.1	27.503.862.301
JUMLAH ASET LANCAR		27.503.862.301
ASET TETAP	C.2.5	229.823.133.270
Tanah Sebelum Disesuaikan	C.2.5.1	142.000.000
Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan	C.2.5.2	10.338.682.341
Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan	C.2.5.3	14.858.015.762
Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebelum Disesuaikan	C.2.5.4	204.484.435.167
JUMLAH ASET TETAP SEBELUM DISESUIKAN		229.823.133.270
JUMLAH ASET TETAP		229.823.133.270
JUMLAH ASET		257.326.995.571
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.6	27.503.862.301
Uang Muka dari KPPN	C.2.6.1	27.503.862.301
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		27.503.862.301
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	C.2.7	0
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	C.2.7.1	0
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan	C.2.7.2	0
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	C.2.7.3	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0
JUMLAH KEWAJIBAN		27.503.862.301
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA INVESTASI	C.2.8	229.823.133.270
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.2.8.1	229.823.133.270
Dana yg Harus Disediakan Utk Pbayaran Utang Jk.Panjang	C.2.8.2	0
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		229.823.133.270
JUMLAH EKUITAS DANA		229.823.133.270
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		257.326.995.571

Pendahuluan

A. PENDAHULUAN

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab II pasal 7 tentang pejabat Perbendaharaan Negara, Bab IX pasal 51 tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD dan pasal 55.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lampiran II Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akruial)
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2009 tentang Perubahan dan Penambahan Bagan Akun Standar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 66/PB/2005, Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, Bab VI Pelaporan Realisasi Anggaran.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkal Pinang merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPPN Pangkal Pinang sebagai unit akuntansi kuasa Bendahara Umum Negara Daerah (BUN-D). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tingkat kuasa BUN-D KPPN Pangkal Pinang terdiri dari Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kebijakan Akuntansi

A.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akruial, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi pemerintah:

Pendapatan

1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Belanja

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

3) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN.

4) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/ sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalty, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan atau dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah per 31 Juli 2014 terbatas pada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya yaitu non permanen dan permanen.

i. Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah dan pihak ketiga lainnya.

Investasi non permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruskan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/ Tempat Simpan Pinjam (USP/ TSP) atau nasabah BPR.

- Seluruh pencairan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) eks dana Surat Utang (SU) 005 yang disalurkan melalui dua pola sebagai berikut:
 - * Dana SU-005 dipinjam langsung oleh Pemerintah kepada Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) yang ditunjuk oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan dalam rangka pendanaan KUMK;
 - * Dana SU-005 dipinjamkan kepada BUMN Pengelola dan selanjutnya diteruskan kepada LKP yang ditunjuk oleh BUMN Pengelola yang bersangkutan dalam rangka pendanaan KUMK.

ii. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada perusahaan negara, lembaga internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara.

Penyertaan Modal Pemerintah dalam badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51% disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Hukum Milik Negara (BUMN/ BHMN). PMP dalam badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen disebut Non BUMN.

PMP dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bias dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning aset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Khusus untuk RDI, menggunakan kurs jual.

Aset Tetap

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan di neraca sebesar harga perolehan berdasarkan neraca Kementerian Negara/Lembaga per 31 Juli 2014. Pengakuan aset tetap berdasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- i. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan,
- ii. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya. Seluruh aset tetap tidak didepresiasi.

Dana Cadangan

d. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Dana cadangan dibentuk berdasarkan kebijakan Pemerintah pada tahun 1991, dimana Pemerintah menyisihkan sebagian kelebihan realisasi pendapatan pajak untuk digunakan sebagai Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP). CAP merupakan restricted cash pemerintah yang akan digunakan apabila terjadi defisit dalam tahun-tahun anggaran berikutnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu jabatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/ pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, maupun Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Aset Lain-lain dapat berupa aset pemerintah yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dikelola pihak lain, tetapi belum ditentukan status hukumnya, seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT

Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan Tim Pemberesan Aset, Departemen Keuangan dan aset pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) BP MIGAS. Disamping itu, piutang macet kementerian negara/ lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan juga termasuk dalam kelompok aset lain-lain. Kas dan setara kas, piutang, dan aset tetap yang dikuasai dan/ atau dimiliki Badan Pengelola Kemayoran (BP Gelora Bung Karno) juga termasuk dalam kelompok aset lain-lain.

Kewajiban

5) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang luar negeri pemerintah adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, leasing, dan kredit komersial yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/ potongan berupa PFK yang belum disetor kepada pihak lain sampai periode pelaporan.

Nilai yang tercantum dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai nominal atas utang luar negeri pemerintah merupakan kewajiban pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk hedge bonds menggunakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terakhir.

6) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah.

Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

B.1. Ikhtisar LAK
Saldo Awal Rp.
15.864.501.244,-

B.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS**SALDO AWAL**

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2014 sebesar Rp. 15.864.501.244,- merupakan kas pemerintah pusat yang tersedia di KPPN Pangkal Pinang untuk digunakan dalam menjalankan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran dengan akun Rekening Kas di KPPN.

Perubahan/ Mutasi Kas
Rp. 10.875.759.266,-

PERUBAHAN/MUTASI KAS

Perubahan/mutasi kas hingga Tahun 2014 yang menjelaskan tentang kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah dengan rincian:

- Kenaikan (Penurunan) Kas Operasi	Rp.	561.198.162.669,00
- Kenaikan (Penurunan) Kas Inves. Non Keu.	Rp.	(234.822.366.896,00)
- Kenaikan (Penurunan) Kas Operasi	Rp.	0,00
- Kenaikan (Penurunan) Kas Operasi	Rp.	(315.500.036.507,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas Pemerintah	Rp.	10.875.759.266,00
Akumulasi Koreksi Pembukuan	Rp.	0,00
Kenaikan (Penurunan) Kas Pemerintah Setelah Koreksi Pembukuan	Rp.	10.875.759.266,00

Saldo Akhir Kas Rp.
26.740.260.510,-

SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir Kas per 31 Juli 2014 sebesar Rp. 26.740.260.510,- merupakan kas pemerintah pusat yang tersedia dan siap digunakan oleh KPPN Pangkal Pinang untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun anggaran 2012.

Penjelasan lebih lanjut lihat Catatan C.2.1.1.

B.2. Penjelasan Per Pos
LAK

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas per 31 Juli 2014 diuraikan sebagai berikut:

ARUS KAS DARI
AKTIVITAS OPERASI
Rp. 561.198.162.669,-

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Menerangkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun periode akuntansi tahun berjalan, yang menunjukkan saldo sebesar Rp. 561.198.162.669,- dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi	Rp.	1.176.274.023.808,00
Dikurangi: Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi		615.075.861.139,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.	561.198.162.669,00

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa daerah setempat sampai dengan periode 31 Juli 2014 telah mampu mendanai seluruh pengeluaran aktivitas operasi dari penerimaannya.

B.2.1. Penerimaan
Perpajakan Rp.
926.564.373.000,-

B.2.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan sebesar Rp. 926.564.373.000,- merupakan penerimaan netto yang dihimpun dari sektor pajak hingga Tahun 2014 setelah dikurangi pengembalian pendapatan pajak. Penerimaan perpajakan dibagi menjadi penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional.

Rincian atas penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional sebagai berikut:

A. Pajak Dalam Negeri

- Pajak Penghasilan	Rp.	559.905.841.072,00
- Pajak Pertambahan Nilai		362.385.225.950,00
- Pajak Bumi dan Bangunan		2.558.543.312,00
- Pendapatan Cukai		0,00
- Pajak Lainnya		8.909.415.977,00
Jumlah Pajak Dalam Negeri	Rp.	933.759.026.311,00

B. Pajak Perdagangan Internasional	
- Bea Masuk dan Bea Keluar	Rp. 5.380.284.600,00
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	Rp. 5.380.284.600,00
Jumlah Penerimaan Perpajakan (A + B)	Rp. 939.139.310.911,00
Dikurangi:	
- Pengembalian Pendapatan PPh	Rp. 3.163.119.787,00
- Pengembalian Pendapatan PPN	9.411.818.124,00
- Pengembalian PBB	0,00
- Pengembalian Pajak Perdagangan Internasional	0,00
Jumlah Pengembalian Perpajakan	Rp. 12.574.937.911,00
Jumlah Penerimaan Perpajakan (Neto)	Rp. 926.564.373.000,00

B.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp. 249.709.650.808,-

B.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 249.709.650.808,- adalah semua penerimaan yang diterima dalam bentuk penerimaan dari penerimaan SDA dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya hingga Tahun 2014.

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Penjualan dan Sewa	Rp. 894.840.537,00
- Pendapatan Jasa	Rp. 16.797.675.255,00
- Pendapatan Bunga	Rp. 0,00
- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	Rp. 1.777.368.267,00
- Pendapatan Pendidikan	Rp. 8.064.413.704,00
- Pendapatan Gratifikasi & Uang Sitaan Hasil Korupsi	Rp. 671.944.375,00
- Pendapatan Iuran dan Denda	Rp. 112.212.733,00
- Pendapatan Lain-lain	Rp. 3.244.284.006,00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	Rp. 31.562.738.877,00
- Penerimaan Sumber Daya Alam	Rp. 33.998.485.905,00
- Pendapatan Bagian Laba BUMN	Rp. 184.151.046.300,00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	Rp. 249.712.271.082,00

B.2.3. Pendapatan Hibah 0,-

B.2.3. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan pendapatan yang disumbangkan dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Hingga Tahun 2014 realisasi Pendapatan Hibah pada KPPN Pangkal Pinang yang berasal dari Pendapatan Hibah Dalam Negeri sebesar Rp. 0,-.

B.2.4. Belanja Pegawai Rp. 267.291.570.857,-

B.2.4. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebesar Rp. 267.291.570.857,- merupakan pengeluaran bersih pemerintah untuk membayar gaji pegawai negeri sipil berupa gaji pokok, tunjangan istri/anak, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, gaji pejabat Negara, dan pembayaran lainnya berupa honorarium, vakasi, lembur, uang makan/lauk pauk, dan kompensasi lainnya kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan dosen/ guru/anggota TNI/Polri, dan lain-lain hingga Tahun 2014.

Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

- Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp. 128.261.240.718,00
- Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	123.948.406.871,00
- Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	227.103.800,00
- Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	158.400.000,00
- Belanja Honorarium	1.504.108.000,00
- Belanja Lembur	1.375.643.000,00
- Belanja Vakasi	777.346.500,00
- Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Transito	11.387.619.092,00
- Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0,00
Jumlah Belanja Pegawai	Rp. 267.639.867.981,00
- Pengembalian Belanja Gaji & Tunjangan PNS	Rp. 142.785.459
- Pengemb.Bel. Gaji & Tunjangan TNI/POLRI	5.039.116
- Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	48.014.000
- Pengembalian Belanja Gaji dan Tunj. Pejabat	0
- Pengembalian Belanja Honorarium	0
- Pengembalian Belanja Lembur	0
- Pengembalian Belanja Vakasi	115.000
- Pengem.Bel.Tunj.Khusus & Pegawai Transito	16.559.212
- Pengembalian Bel.Pensiun & Uang Tunggu	135.784.337
Jumlah Pengembalian Belanja Pegawai	Rp. 348.297.124
Jumlah Belanja Pegawai Netto	Rp. 267.291.570.857,00

B.2.5. Belanja Barang
Rp. 301.395.449.957,-

B.2.5. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang hingga Tahun 2014 sebesar Rp. 301.514.845.957,-. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut:

- Belanja Barang Operasional	Rp.	65.509.723.487,00
- Belanja Barang Non Operasional		80.877.826.542,00
- Belanja Jasa		34.242.966.820,00
- Belanja Pemeliharaan		32.673.997.211,00
- Belanja Perjalanan Dalam Negeri		73.713.718.547,00
- Belanja Barang Untuk diserahkan kpd Masyarakat		14.062.315.850,00
- Belanja Barang Penunjang Dana Kegiatan DKTP		314.901.500,00
- Belanja Barang Lainnya Untuk diserahkan kpd Masyarakat		119.396.000,00
Jumlah Belanja Barang	Rp.	301.514.845.957,00

B.2.6. Bunga Utang Rp. 0,-

B.2.6. Bunga Utang

Bunga Utang merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (Principal Outstanding) baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Bunga utang diklasifikasikan menjadi Bunga dan Kewajiban Utang Dalam Negeri serta Bunga dan Kewajiban Utang Luar Negeri.

B.2.6.1 Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Rp. 0,-

B.2.6.1 Belanja Pembayaran Kewajiban Utang (Denda)

Realisasi pembayaran kewajiban utang (Denda) merupakan pembayaran imbalan bunga pajak yang dilakukan atas penerbitan SPM-IB Pajak hingga periode yang berakhir Tahun 2014 sebesar Rp. 0,

B.2.7. Subsidi Rp. 0,-

B.2.7. Subsidi

Subsidi terdiri dari: Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan – Public Service Obligation. Tidak terdapat Subsidi sampai dengan Tahun 2014 pada Wilayah Kerja KPPN Pangkal Pinang.

B.2.8. Hibah Rp. 0,-

B.2.8. Hibah

Tidak terdapat realisasi Hibah sampai dengan Tahun 2014 pada Wilayah Kerja KPPN Pangkal Pinang.

B.2.9. Belanja Sosial Rp. 46.269.444.325,-

B.2.9. Belanja Sosial

Realisasi Belanja Sosial hingga Tahun 2014 sebesar Rp. 46.269.444.325,- yang terdiri atas:

- Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	Rp.	282.000.000,00
- Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial		105.000.000,00
- Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial		33.810.509.925,00
- Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial		320.000.000,00
- BanSos Untuk Penanggulangan Kemiskinan		11.751.934.400,00
- BanSos Untuk Penanggulangan Kemiskinan		0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	Rp.	46.269.444.325,00
- Pengembalian Bel.Bansos	Rp.	0,00
Jumlah Pengembalian Bantuan Sosial	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial (Netto)	Rp.	46.269.444.325,00

B.2.10. Belanja Lain-lain Rp. 0,-

B.2.10. Belanja Lain-lain

Realisasi Belanja Lain-lain sampai dengan periode 31 Juli 2014 sebesar Rp. 0,-.

B.2.11. Belanja Perimbangan Rp. 0,-

B.2.11. Belanja Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp. 0,- adalah semua pengeluaran yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Rincian Belanja Perimbangan adalah sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil PBB :

- Dana Bagi Hasil PBB	: Rp.	0
Jumlah	: Rp.	0
Total Belanja Perimbangan	: Rp.	0

B.2.12. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Rp. 0,-

B.2.12. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, serta untuk penyesuaian kekurangan dana alokasi umum untuk beberapa daerah.

Untuk wilayah kerja KPPN Pangkal Pinang hingga periode Tahun 2014 tidak terdapat realisasi Dana Penyesuaian/Penyeimbang.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Rp. -234.822.366.896,-

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Aktivitas investasi aset non keuangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan investasi hingga Tahun 2014 sebesar Rp. -234.822.366.896 dengan rincian sebagai berikut :

- Arus Kas Masuk Akt. Invest. Aset Non Keu.	Rp.	109.101.274,00
Dikurangi:		
- Arus Kas Keluar Akt.Inv.Aset Non Keu.		234.931.468.170,00
Arus Kas Bersih dari Akt.Inv. Aset Non Keu.	Rp.	(234.822.366.896,00)

B.2.13. Pendapatan Penjualan Aset Tetap Rp. 106.481.000,-

B.2.13. Pendapatan Penjualan Aset Tetap

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap merupakan pendapatan yang diterima pemerintah sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam menjual/melepas aset-asetnya berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku. Sampai dengan periode 31 Juli 2014 realisasi Pendapatan Penjualan Aset Tetap dicatat KPPN Pangkal Pinang sebesar Rp. 106.481.000,-.

B.2.14. Penjualan Aset Lainnya Rp. 2.620.274,-

B.2.14. Penjualan Aset Lainnya

Realisasi Penjualan Aset Lainnya semuanya berasal dari Pendapatan Penjualan Aset lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapus. Sampai dengan periode 31 Juli 2014 tidak terdapat realisasi Penjualan Aset Lainnya pada Wilayah Kerja KPPN Pangkal Pinang.

Belanja Modal Rp. 234.931.468.170,-

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal hingga 31 Juli 2014 pada KPPN Pangkal Pinang sebesar Rp. 234.931.468.170,-.

B.2.15. Belanja Modal untuk Tanah Rp. 142.000.000,-

B.2.15. Belanja Modal untuk Tanah

Realisasi Belanja Modal untuk Tanah hingga 31 Juli 2014 sebesar Rp. 142.000.000,-.

B.2.16. Belanja Modal untuk Peralatan & Mesin Rp. 10.338.682.341,-

B.2.16. Belanja Modal untuk Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal untuk Peralatan dan Mesin hingga 31 Juli 2014 sebesar Rp. 10.338.682.341,-.

B.2.17. Belanja Modal untuk Gedung & Bangunan Rp. 14.858.015.762,-

B.2.17. Belanja Modal untuk Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan hingga 31 Juli 2014 sebesar Rp. 14.858.015.762,-.

B.2.18. Belanja Modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 204.484.435.167,-

B.2.18. Belanja Modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan hingga 31 Juli 2014 sebesar Rp. 204.484.435.167,-.

B.2.19. Belanja Modal untuk Fisik Lainnya Rp. 5.108.334.900,-

B.2.19. Belanja Modal untuk Fisik Lainnya

Realisasi Belanja Modal untuk Fisik Lainnya hingga 31 Juli 2014 sebesar Rp. 5.108.334.900,-.

B.2.20. Belanja Modal untuk BLU Rp. 0,-

B.2.20. Belanja Modal untuk Badan Layanan Umum

Hingga 31 Juli 2014 tidak terdapat Belanja Modal untuk Badan Layanan Umum di dalam wilayah kerja KPPN Pangkal Pinang.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Menjelaskan arus kas dari aktivitas pembiayaan yang berupa Penerimaan Pembiayaan Lain-lain, Penarikan Pinjaman Program, Belanja Pengeluaran Surat Utang Negara/Obligasi, Pembiayaan Cicilan Utang Luar Negeri. Hingga 31 Juli 2014 arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan tercatat sebesar Rp. 0,-.

B.2.21. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Tidak terdapat Pembiayaan Lain-lain hingga 31 Juli 2014.

B.2.22. Penarikan Pinjaman Program

Realisasi Penarikan Pinjaman Program hingga 31 Juli 2014 sebesar Rp. 0,-.

B.2.23. Belanja Pengeluaran Surat Utang Negara/Obligasi

Tidak terdapat Belanja Pengeluaran Surat Utang Negara/Obligasi hingga 31 Juli 2014.

B.2.24. Pembiayaan Cicilan Utang Luar Negeri

Tidak terdapat Pembiayaan Cicilan Utang Luar Negeri hingga 31 Juli 2014.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Aktivitas Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas (bruto) yang tidak mempengaruhi anggaran. Dalam tahun anggaran berjalan arus kas dari aktivitas non anggaran mengalami kenaikan / penurunan sebesar Rp. -315.500.036.507,- dengan rincian sebagai berikut:

- Arus Kas Masuk Aktivitas Non Anggaran	Rp.	1.209.647.670.817,00
- Arus Kas Keluar Aktivitas Non Anggaran		1.525.147.707.324,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.	-315.500.036.507,00

B.2.25. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp. 72.809.314.809,- merupakan penerimaan pemerintah yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk fihak ketiga, misalnya potongan atas gaji, pensiun, beras BULOG, dan lain-lain.

Rincian atas Penerimaan PFK sampai dengan 31 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

- Penerimaan PFK 10% Gaji	Rp.	56.371.043.512,00
- Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan		7.610.732,00
- Penerimaan PFK Beras Bulog		4.298.977.182,00
- Penerimaan PFK 2% Pemda		11.016.671.383,00
- Penerimaan PFK Lain-lain		1.115.012.000,00
Jumlah Penerimaan PFK	Rp.	72.809.314.809,00

B.2.26. Kiriman Uang Masuk

Kiriman Uang (KU) Masuk sebesar Rp. 1.077.789.614.169,- merupakan penerimaan kiriman uang antar rekening-rekening pemerintah yang berasal dari KPPN, Penerimaan Pemindahbukuan, dan Penerimaan Kiriman Uang dalam Rangka Reksus. Rincian KU Masuk sampai dengan 31 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

- Penerimaan Kiriman Uang	Rp.	863.285.795.057,00
- Penerimaan Pemindahbukuan		214.503.819.112,00
Jumlah Penerimaan Kiriman Uang	Rp.	1.077.789.614.169,00

B.2.27. Penerimaan Transito

Penerimaan transito sebesar Rp. 56.440.041.141,- merupakan sisa uang muka bendahara yang disetor ke kas Negara baik itu yang berasal dari bendahara rutin, proyek, maupun swadana. Rincian Penerimaan Transito hingga 31 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

- Penerimaan Transito TAB Dana Rupiah	Rp.	55.172.270.949,00
- Penerimaan Transito TAB Dana PHLN		0,00
- Penerimaan Transito TAB Dana PNBPN		609.772.000,00
- Penerimaan Transito TAYL		657.998.192,00
Jumlah Penerimaan Transito	Rp.	56.440.041.141,00

B.2.28. *Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rp. 2.604.074.698,-*

B.2.28. Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga

Realisasi Penerimaan Non Anggaran Pihak ketiga hingga 31 Juli 2014 sebesar Rp. 2.604.074.698,-.

B.2.29. *Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Rp. 4.203.103.766,-*

B.2.29. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga merupakan pengeluaran pemerintah sehubungan dengan Pengeluaran untuk Dana Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), Asuransi Kesehatan, dan Pembayaran Beras kepada BULOG. Pengeluaran PFK hingga 31 Juli 2014 sebesar Rp. 4.203.103.766,-.

B.2.30. *Pengeluaran Kiriman Uang Rp. 1.434.989.436.506,-*

B.2.30. Pengeluaran Kiriman Uang

Kiriman Uang (KU) Keluar sebesar Rp. 1.434.989.436.506,- merupakan pengeluaran kiriman uang antar rekening-rekening pemerintah yang berasal dari KPPN, Penerimaan Pemindahbukuan, dan Penerimaan Kiriman Uang dalam Rangka Reksus. Rincian KU Keluar hingga 31 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

- Pengeluaran KU	Rp.	1.220.485.617.394,00
- Pengeluaran KU Dalam Rangka Reksus		0,00
- Pengeluaran Pemindahbukuan		214.503.819.112,00
Jumlah Pengeluaran Kiriman Uang	Rp.	1.434.989.436.506,00

B.2.31. *Pengeluaran Transito Rp. 82.935.905.250,-*

B.2.31. Pengeluaran Transito

Pengeluaran Transito sebesar Rp. 82.935.905.250,- merupakan uang muka bendahara yang ditarik dari Kas Negara oleh bendahara rutin, proyek, maupun swadana. Rincian Pengeluaran Transito tersebut hingga 31 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

- UP Dana Rupiah	Rp.	80.861.017.250,00
- UP Dana Pinjaman/Hibah LN		0,00
- UP Pengguna PNB (Swadana)		2.074.888.000,00
Jumlah Pengeluaran Transito	Rp.	82.935.905.250,00

B.2.32. *Pengel. Non Anggaran Pihak Ketiga Rp. 3.014.635.802,-*

B.2.32. Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga

Untuk realisasi Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga hingga 31 Juli 2014 sebesar Rp. 3.014.635.802,-.

B.3. *Catatan Penting Lainnya*

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

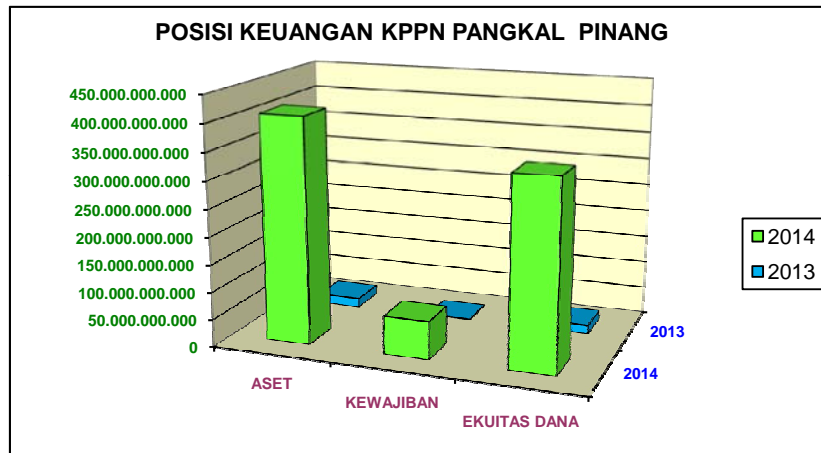
-

-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1. Posisi Keuangan****C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM**

Posisi keuangan KPPN Pangkal Pinang sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara per 31 Juli 2014 terdiri dari Aset sebesar Rp. 411.443.945.148,- Kewajiban sebesar Rp. 69.384.497.048,- dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 342.059.448.100,-. Posisi Neraca disajikan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik I. Posisi Keuangan KPPN Pangkal Pinang



Jumlah Aset sebesar Rp. 411.443.945.148,- berupa Aset Lancar, sedangkan jumlah Kewajiban sebesar Rp. 69.384.497.048,- berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga dan jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp. 342.059.448.100,- dalam bentuk SAL dan SILPA.

C.2. Penjelasan**C.2. PENJELASAN PER POS NERACA****C.2.1. Aset Lancar**
411.443.945.148,-**C.2.1. Aset Lancar**

Aset Lancar sebesar Rp. 411.443.945.148,- terdiri dari: (i) Rekening Kas di KPPN sebesar Rp.26.740.260.510,-; (ii) Kas dalam Transito sebesar Rp.357.199.822.337,-; dan (iii) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.27.503.862.301,-.

C.2.1.1. Rekening Kas di KPPN
26.740.260.510,-**C.2.1.1. Rekening Kas di KPPN**

Rekening Kas di KPPN pada LAK dan N KUN sebesar Rp. 26.740.260.510,- merupakan saldo kas per 31 Juli 2014 yang ada pada Rekening Bank dan Giro Pos dari seluruh Rekening milik KPPN sebagai Kuasa BUN, yaitu:

1. Bank Operasional I	Rp.	0,00
2. Bank Operasional II		
- 120 BRI Cab. Pangkal Pinang	Rp.	21.572.677.800,00
- 121 Mandiri Cab. Pangkal Pinang	Rp.	876.939.300,00
- 122 BNI Cab. Pangkal Pinang	Rp.	1.307.369.800,00
- 123 BTN Cab. Pangkal Pinang QQ BO II Gaji	Rp.	2.442.867.100,00
- 124 Bank Sumsel Babel Pangkal Pinang	Rp.	0,00
Total BO II	Rp.	26.199.854.000,00
3. Bank Operasional III		
- 501 BRI Sungai Liat -Kab.Bangka Selatan (PBB)	Rp.	0,00
- 502 BRI Sungai Liat -Kab.Bangka (PBB)	Rp.	340.101.200,00
- 503 BNI Cab. Pangkal Pinang	Rp.	0,00
- 504 BRI Sungai Liat -Kab.Bangka Tengah (PBB)	Rp.	0,00
- 505 BRI Sungai Liat -Kab.Bangka Barat (PBB)	Rp.	99.846.600,00
Total BO III	Rp.	439.947.800,00
4. Rekening Retur	Rp.	102.215.710,00
5. Hibah Langsung	Rp.	0,00
6. Bank Persepsi - Total	Rp.	(39.000,00)
7. Giro Pos - Total	Rp.	(1.718.000,00)
Total	Rp.	26.740.260.510,00

C.2.1.2. Kas dalam
Transito
357.199.822.337,-

C.2.1.2. Kas dalam Transito

Rekening Kas dalam Transito sebesar Rp. 357.199.822.337,- merupakan saldo kas per 31 Juli 2014.

Rincian Kas dalam Transito adalah sebagai berikut :

- Pengeluaran Kiriman uang	:	Rp.	1.434.989.436.506,00	
- Penerimaan Kiriman uang	:	Rp.	1.077.789.614.169,00	
Jumlah	:	Rp.	357.199.822.337,00	(-)

C.2.1.3. Kas di
Bendahara
Pengeluaran
27.503.862.301,-

C.2.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 27.503.862.301,- merupakan saldo kas per 31 Juli 2014 dalam bentuk Uang Persediaan (UP) dan TUP yang diberikan oleh KPPN kepada satker di wilayah kerja KPPN Pangkal Pinang yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Juli 2014 .

C.2.2. Kewajiban
69.384.497.048,-

C.2.2. Kewajiban

Jumlah Kewajiban sebesar Rp. 69.384.497.048,- berupa Kewajiban Jangka Pendek yang berasal dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga dan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Juli 2014.

C.2.2.1. Utang
Perhitungan
Fihak
Ketiga 68.606.211.043

C.2.2.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Realisasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga yang berasal dari potongan SPM/SP2D, yang akan dibayarkan oleh Kantor Pusat Ditjen PBN ke instansi terkait sebesar Rp. 68.606.211.043,-.

C.2.2.2. Utang
kepada Pihak Ketiga
778.286.005

C.2.2.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga untuk keadaan per 31 Juli 2014 pada KPPN Pangkal Pinang. Sebesar RP. 778.286.005,-.

C.2.3. Ekuitas Dana
Lancar 342.059.448.100,-

C.2.3. Ekuitas Dana Lancar

Jumlah Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.342.059.448.100,- terdiri dari: (i) Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp.15.683.652.327,-dan (ii) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.326.375.795.773,-.

C.2.3.1. SAL
15.683.652.327,-

C.2.3.1. SAL

Jumlah SAL dan SILPA sampai dengan 31 Juli 2014 TA 2014 adalah Rp. 342.059.448.100,-

Rincian SAL adalah sebagai berikut :

- SAL s.d. TA 2013	:	Rp.	15.683.652.327,00	
- SILPA	:	Rp.	326.375.795.773,00	
Jumlah SAL	:	Rp.	342.059.448.100,00	(+)

C.2.3.2. SILPA
326.375.795.773,-

C.2.3.2. SILPA

Jumlah SILPA sebesar Rp. 326.375.795.773,- merupakan saldo penjumlahan lebih/kurang dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Non Keuangan dan Aktivitas Pembiayaan.

Rincian SILPA adalah sebagai berikut :

- Aktivitas Operasi	:	Rp.	561.198.162.669,00	
- Aktivitas Non Keuangan	:	Rp.	(234.822.366.896,00)	
- Aktivitas Pembiayaan	:	Rp.	0,00	
Jumlah SILPA	:	Rp.	326.375.795.773,00	(+)

C.3. Catatan Penting
Lainnya

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan-catatan penting yang diungkapkan pada bagian ini antara lain:

*D.1. Penjelasan Umum
Laporan Realisasi APBN*

D.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Pangkal Pinang hingga Tahun 2014 sebesar Rp. 1.176.383.125.082,- berasal dari Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah.

Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Negara Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pemerintah melalui berbagai upaya berusaha untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari tahun ke tahun antara lain; ekstensifikasi subjek dan objek pajak, peningkatan pelayanan para petugas pajak dan menggali sumber pajak yang belum tersentuh.

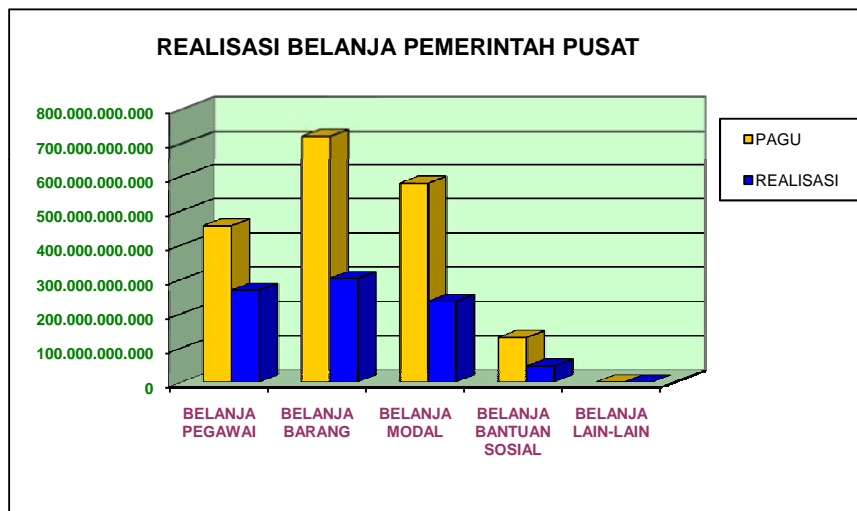
Penerimaan Negara Bukan Pajak juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk membiayai operasional di daerah terkait.

Realisasi Penerimaan Dalam Negeri hingga Tahun 2014 Rp. 1.176.383.125.082,- yang berasal dari Penerimaan Perpajakan Rp. 926.564.373.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp. 249.818.752.082,-.

Realisasi Penerimaan Hibah sampai dengan Tahun 2014 pada Wilayah Kerja KPPN Pangkal Pinang sebesar Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Tahun 2014 di wilayah kerja KPPN Pangkal Pinang sebesar Rp. 850.007.329.309,- yang terdiri dari; Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain. Realisasi Belanja hingga Tahun 2014 dapat dilihat pada Grafik II.

Grafik II. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat



D.2. Penjelasan

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

*D.2.1. Realisasi
Pendapatan Negara dan
Hibah 1.176.383.125.082,-*

D.2.1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga Tahun 2014 sebesar Rp. 1.176.383.125.082,- terdiri dari:

D.2.1.1. *Penerimaan Dalam Negeri*
1.176.383.125.082,-

D.2.1.1. Penerimaan Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Dalam Negeri sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp. 1.176.383.125.082,-. Penerimaan Dalam Negeri berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp. 926.564.373.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebanyak Rp. 249.818.752.082,-. Secara grafik jenis realisasi penerimaan tersebut dapat dilihat pada Grafik III di bawah ini.

Grafik III. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri



D.2.1.1.1. *Penerimaan Perpajakan*
926.564.373.000,-

D.2.1.1.1. Penerimaan Perpajakan

Realisasi Penerimaan Perpajakan hingga Tahun 2014 sebesar Rp. 926.564.373.000,- berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional.

D.2.1.1.1.1. *Pajak Dalam Negeri*
921.184.088.400,-

D.2.1.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri hingga Tahun 2014 Rp. 921.184.088.400,- yang terdiri dari:

- Pendapatan PPh Non Migas	Rp.	559.905.841.072,00
- Pendapatan PPh Fiskal		0,00
- Pendapatan PPN		362.385.225.950,00
- Pendapatan PBB		2.558.543.312,00
- Pendapatan Pajak Lainnya		8.909.415.977,00
Total Penerimaan Pajak Dalam Negeri	Rp.	933.759.026.311,00
dikurangi:		
- Pengembalian Pendapatan PPh	Rp.	3.163.119.787,00
- Pengembalian Pendapatan PPN		9.411.818.124,00
- Pengembalian Pendapatan PBB		0,00
Total Pengembalian Pajak Dalam Negeri	Rp.	12.574.937.911,00
Jumlah Bersih Pajak Dalam Negeri	Rp.	921.184.088.400,00

D.2.1.1.1.2. *Pajak Perdagangan Internasional*
5.380.284.600,-

D.2.1.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional hingga Tahun 2014 sebesar Rp. 5.380.284.600,- dengan rincian Pendapatan Bea Masuk sebesar Rp. 5.380.284.600,-, dan Pendapatan Bea Keluar Rp. 0,-.

D.2.1.1.2. *Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*
249.818.752.082,-

D.2.1.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp. 249.818.752.082,- berasal dari Penerimaan Sumber Daya Alam, Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dan penerimaan PNBP Lainnya.

D.2.1.1.2.1. *Penerimaan Sumber Daya Alam*
33.998.485.905,-

D.2.1.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Realisasi Penerimaan Sumber daya alam yang berasal dari pendapatan pertambangan umum sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp. 33.998.485.905,- .

D.2.1.1.2.2. *Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN*
184.151.046.300,-

D.2.1.1.2.2. Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN

Sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 terdapat realisasi penerimaan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN.sebesar Rp.184.151.046.300,- .

D.2.1.1.2.3. *Pendapatan PNBP Lainnya*
31.669.219.877,-

D.2.1.1.2.3. Pendapatan PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya selama Tahun 2014 sebesar Rp. 31.669.219.877,- yang berasal dari:

- Pendapatan Penjualan & Sewa	Rp.	1.001.321.537,00
- Pendapatan Jasa		16.797.675.255,00
- Pendapatan Bunga		0,00
- Pendapatan Kejaksaan & Peradilan		1.777.368.267,00
- Pendapatan Pendidikan		8.064.413.704,00
- Pendapatan Gratifikasi & Sitaan Hasil Korupsi		671.944.375,00
- Pendapatan Iuran & Denda		112.212.733,00
- Pendapatan Lain-lain		3.244.284.006,00

Jumlah PNBP Lainnya **Rp. 31.669.219.877,00**

D.2.1.2. *Hibah 0,-*

D.2.1.2. Hibah

Realisasi Hibah hingga Tahun 2014 pada Wilayah Kerja KPPN Pangkal Pinang sebesar Rp. 0,-. Realisasi ini berasal dari Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang sebesar Rp.0,- dan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah

D.2.2. *Belanja Negara*
850.007.329.309,-

D.2.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara hingga Tahun 2014 sebesar Rp. 850.007.329.309,- atau 45,11 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Belanja Negara terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp.850.007.329.309,- dan Transfer ke Daerah sebesar Rp.0,-.

D.2.2.1. *Belanja Pemerintah Pusat*
850.007.329.309,-

D.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Tahun 2014 Rp. 850.007.329.309,- atau 45,11 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Realisasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Lain-lain.

D.2.2.1.1. *Belanja Pegawai*
267.291.570.857,-

D.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai hingga periode yang berakhir 31 Juli 2014 sebesar Rp. 267.291.570.857,- atau 58,71 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

- Belanja Gaji & Tunjangan PNS	Rp.	128.261.240.718,00
- Belanja Gaji & Tunjangan TNI/POLRI		123.948.406.871,00
- Belanja Gaji & Tunjangan Non PNS		227.103.800,00
- Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara		158.400.000,00
- Belanja Honorarium		1.504.108.000,00
- Belanja Lembur		1.375.643.000,00
- Belanja Vakasi		777.346.500,00
- Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito		11.387.619.092,00
- Belanja Pensiun dan Uang Tunggu		0,00

A. Total Belanja Pegawai **Rp. 267.639.867.981,00**

- Pengembalian Bel.Gaji & Tunjangan PNS	Rp.	142.785.459,00
- Pengembalian Bel.Gaji & Tunj.TNI/POLRI		5.039.116,00
- Pengembalian Bel.Gaji & Tunj.Non PNS		48.014.000,00
- Pengembalian Bel.Gaji & Tunj. Pejabat Negara		0,00
- Pengembalian Belanja Honorarium		0,00
- Pengembalian Belanja Lembur		0,00
- Pengembalian Belanja Vakasi		115.000,00
- Pengemb.Bel.Tunj.Khusus & Bel.Peg.Transito		16.559.212,00
- Pengembalian Bel.Pensiun & Uang Tunggu		135.784.337,00

B. Total Pengembalian Belanja Pegawai **Rp. 348.297.124,00**

Jumlah Bersih Belanja Pegawai (A - B) **Rp. 267.291.570.857,00**

D.2.2.1.2. Belanja
Barang 301.514.845.957,-

D.2.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp. 301.514.845.957,- atau sebesar 41,84 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Rincian untuk Belanja Barang adalah sebagai berikut:

- Belanja Barang Operasional	Rp.	65.939.297.737,00
- Belanja Barang Non Operasional		80.925.192.292,00
- Belanja Jasa		34.287.476.820,00
- Belanja Pemeliharaan		32.673.997.211,00
- Belanja Perjalanan		74.072.352.637,00
- Belanja Barang Untuk diserahkan kpd Masyarakat		14.062.315.850,00
- Belanja Barang Penunjang Dana Kegiatan DKTP untuk diserahkan kepada Pemda		314.901.500,00
- Belanja Barang Lainnya Untuk diserahkan Kepada Masyarakat		119.396.000,00
A. Total Belanja Barang	Rp.	302.394.930.047,00
- Pengembalian Bel.Barang Operasional	Rp.	429.574.250,00
- Pengembalian Bel.Barang Non Operasional		47.365.750,00
- Pengembalian Belanja Pemeliharaan		44.510.000,00
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri		0,00
- Pengembalian Belanja Barang Untuk diserahkan kpd Masyarakat		358.634.090,00
- Pengembalian Belanja Barang Penunjang Dana Kegiatan DKTP untuk diserahkan kepada Pemda		0,00
B. Total Pengembalian Belanja Barang	Rp.	880.084.090,00
Jumlah Bersih Belanja Barang (A - B)	Rp.	301.514.845.957,00

D.2.2.1.3. Belanja Modal
234.931.468.170,-

D.2.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal hingga periode yang berakhir 31 Juli 2014 sebesar Rp. 234.931.468.170,- atau sebesar 40,58 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA yang terdiri dari:

- Belanja Modal Tanah Netto	Rp.	142.000.000,00
- Belanja Modal Tanah Netto pencatatan atas Hibah		0,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Netto		10.338.682.341,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Netto pencatatan atas Hibah		0,00
- Belanja Modal Gedung & Bangunan Netto		14.858.015.762,00
- Belanja Modal Gedung & Bangunan Netto pencatatan atas Hibah		0,00
- Belanja Modal Jalan, Irigasi, & Jaringan Netto		204.484.435.167,00
- Belanja Modal Fisik Lainnya Netto		5.108.334.900,00
Jumlah Belanja Modal Netto	Rp.	234.931.468.170,00

D.2.2.1.3.1 Belanja
Pembayaran Kewajiban
Utang 0,-

D.2.2.1.3.1 Belanja Pembayaran Kewajiban Utang(Denda)

Realisasi pembayaran kewajiban utang (Denda) merupakan pembayaran imbalan bunga pajak yang dilakukan atas penerbitan SPM-IB Pajak hingga periode yang berakhir 31 Juli 2014 sebesar Rp. 0,

D.2.2.1.4. Belanja
Pembayaran Bunga
Utang 0,-

D.2.2.1.4. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Tidak terdapat Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri sampai dengan bulan Januari 2014.

D.2.2.1.5. Belanja
Subsidi 0,-

D.2.2.1.5. Belanja Subsidi

Tidak terdapat realisasi Belanja Subsidi sampai dengan Tahun 2014.

D.2.2.1.6. Belanja Hibah
0,-

D.2.2.1.6. Belanja Hibah

Tidak terdapat realisasi Belanja Hibah sampai dengan Tahun 2014.

D.2.2.1.7. Belanja
Bantuan Sosial
46.269.444.325,-

D.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Juli 2014 sebesar Rp. 46.269.444.325,- atau sebesar 35,75 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial terdiri dari:

- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	Rp.	282.000.000
- Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial		105.000.000
- Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial		33.810.509.925
- Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial		320.000.000
- Belanja Bantuan Sosial Penanggulangan Kemiskinan		11.751.934.400
- Belanja BanSos Untuk Penanggulangan Bencana		0,00
A. Total Belanja Bantuan Sosial	Rp.	46.269.444.325,00
dikurangi:		
- Pengembalian Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00
B. Total Pengembalian Bel.Bantuan Sosial	Rp.	0,00
Jumlah Bersih Belanja Bantuan Sosial (A - B)	Rp.	46.269.444.325,00

D.2.2.1.8. *Belanja Lain-lain* 0,-

D.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

Tidak terdapat realisasi Belanja Lain-lain sampai dengan Tahun 2014.

D.2.2.2. *Transfer ke Daerah* 0,-

D.2.2.2. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah hingga Tahun 2014 sebesar Rp. 0,-. Realisasi tersebut hanya berasal dari Transfer Dana Perimbangan yang merupakan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.

D.2.2.2.1. *Dana Perimbangan* 0,-

Realisasi Dana Perimbangan hingga Tahun 2014 sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari:

- Dana Bagi Hasil Pajak	0,00
- Dana Alokasi Umum	0,00
- Dana Alokasi Khusus	0,00

Total Dana Perimbangan

Rp. 0,00

D.2.2.2.2. *Bel. Otonomi Khusus & Penyesuaian* 0,-

D.2.2.2.2. Belanja Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Tidak terdapat realisasi Belanja Otonomi Khusus dan Penyesuaian hingga periode yang berakhir 31 Juli 2014.

D.2.3. *Surplus/Defisit Anggaran* 326.375.795.773,-

D.2.3. Surplus/Defisit Anggaran

Hingga periode yang berakhir pada 31 Juli 2014, KPPN Pangkal Pinang membukukan surplus anggaran sebesar Rp. 326.375.795.773,-.

D.2.4. *Pembiayaan* 0,-

D.2.4. Pembiayaan

Hingga akhir periode 31 Juli 2014 tercatat realisasi Pembiayaan sebesar Rp. 0,-. Realisasi Pembiayaan tersebut berasal dari Pembiayaan Luar Negeri.

D.2.4.1. *Pembiayaan Dalam Negeri* 0,-

D.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

D.2.4.1.1. *Perbankan Dalam Negeri* 0,-

D.2.4.1.1. Perbankan Dalam Negeri

Tidak terdapat realisasi pembiayaan Perbankan Dalam Negeri hingga Tahun 2014.

D.2.4.1.2. *Non Perbankan Dalam Negeri* 0,-

D.2.4.1.2. Non Perbankan Dalam Negeri

Tidak terdapat realisasi pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri hingga 31 Juli 2014.

D.2.4.2. *Pembiayaan Luar Negeri* 0,-

D.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri

Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari: Penarikan Pinjaman LN (bruto) dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN. Hingga periode Tahun 2014 tidak terdapat realisasi pembiayaan luar negeri.

D.2.5. *SILPA/SIKPA* 326.375.795.773,-

D.2.5. SILPA/SIKPA

Terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) hingga Tahun 2014 pada KPPN Pangkal Pinang sebesar Rp. 326.375.795.773 dimana angka tersebut merupakan penjumlahan dari Realisasi Pembiayaan dan Surplus/Defisit Anggaran.

D.3. *Catatan Penting Lainnya*

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan-catatan penting yang akan diungkapkan pada bagian ini antara lain:

E. CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan-catatan penting yang akan diungkapkan pada bagian ini antara lain:

1. Neraca SAU tidak menggabungkan data Neraca SAI, sehingga dimungkinkan perbedaan data antara lain berasal dari informasi akrual. KPA Satuan Kerja bertanggung jawab terhadap kebenaran data Neraca SAI.
2. Belanja Dana Bagi Hasil dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) disajikan pada Laporan Arus Kas.
3. Terdapat 1 (satu) Satker yang hingga saat dibuatnya LKPP periode yang berakhir pada 31 Juli 2014 belum menyetorkan sisa UP TA 2010, yaitu LPMP Kepulauan Bangka Belitung (023.08.653593) sebesar Rp.350.000.000,- karena uang tersebut dicuri. Hingga saat laporan ini dibuat masih dalam proses hukum dan menunggu penyelesaian lebih lanjut.
4. Pada Laporan ini, terdapat perbedaan saldo antara Saldo Bank menurut KPPN dengan saldo menurut rekening koran bank. sebesar Rp.1.423.906.954,- . Dengan uraian :

Uraian	Saldo Menurut KPPN Rp	Saldo Menurut RK Bank Rp
Total Saldo Bank	26.740.260.510	27.695.087.827
Selisih	1.757.000	(953.070.317)
Total Saldo	26.742.017.510	26.742.017.510

Kelebihan Limpah PT Bank BRI Sungailiat (Kode Bank 210) tanggal 11-06-2014
Tanggal 11 Juni 2014 sebesar Rp.30.000,- dan tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp. 9.000,-

Kelebihan Limpah PT Pos Indonesia Pangkalinang tanggal 21 Juli 2014 sebesar
Rp.1.718.000,-tanggal 11-06-2014 .

Penerimaan Tanggal 25 Juli pada PT Bank BPD Sumsel setelah jam 15.00 yang
dilimpahkan pada tanggal 04 Agustus 2014 sesuai S-4450/PB/2014 tentang Penegasan
Penerimaan Negara pada Hari Raya Idul Fitri 1435 H

Kesalahan Pembukuan oleh PT Bank BRI Pangkalpinang pada Tanggal 25 Juli 2014
sebesar Rp.6.875.000,- seharusnya tidak dimasukkan ke rekening Persepsi

5. Pada Laporan Arus Kas terdapat *minus pada Belanja kontribusi Sosial* baik pada sub akun 5131 (baik pada belanja pensiun dan uang tunggu PNS dan pejabat negara, belanja pensiun dan uang tunggu TNI/Polri maupun pada belanja dan uang tunggu pensiun veteran dan PKRI/KNIP) sebesar Rp. (101.232.537,-)
Hal ini terjadi karena terdapat baik penerimaan maupun pengeluaran DAMU pada periode berjalan dengan total pengeluaran SP2D(sub akun 5131 sebesar Rp.0,- dikurangi dengan total penerimaan setoran MPN atas DAMU (sub akun 5131) sebesar Rp.135.784.337,- = Rp.(135.784.337,-)
6. Sampai dengan akhir bulan Januari Tahun Anggaran 2014, belum terdapat Hibah dalam Negeri Langsung dalam bentuk Uang maupun barang dari Pemerintah Daerah dan Lainnya
7. Pada Laporan Arus Kas (LAK) masih terdapat Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) akun 423221 sebesar Rp. 177.129.628,-
Hal ini terjadi karena masih terdapat rekening pemerintah yang diberikan jasa giro oleh bank.
8. Pada LAK terdapat Belanja Gaji Pokok PNS (511111) yang tidak bulat (sampai pada pecahan rupiah) sebesar Rp. 39.942.069.130,- Realisasi tersebut sampai pecahan rupiah dikarenakan terdapat penerbitan SP2D pada Satker Universitas Bangka Belitung (023.04.663120) dengan rincian :

No	BAES I Kd Satker	Akun dan Nilai	Ket
1	023. 04. 663120 Universitas Bangka Belitung (U B B)	akun 511111 Rp. 45.153.391,-	SP2D No.581404D tanggal 02-01-2014
		akun 511111 Rp. 45.153.391,-	SP2D No.581840D tanggal 03-02-2014

	akun 511111 Rp. 56.710.825,-	SP2D No.586313D tanggal 03-03-2014
	akun 511111 Rp. 23.114.868,-	SP2D No.586303D tanggal 07-02-2014
	akun 511111 Rp. 56.710.825,-	SP2D No.589102D tanggal 01-04-2014
	akun 511111 Rp. 56.747.287,-	SP2D No.592678D tanggal 02-05-2014
	akun 511111 Rp. 56.747.287,-	SP2D No.594760D tanggal 02-06-2014
	akun 511111 Rp. 6.837.723,-	SP2D No591732D tanggal 11-04-2014

KPPN Pangkalpinang telah menerbitkan Nota Dinas kepada Satker bersangkutan guna konfirmasi atas hal tersebut, namun hingga saat ini belum mendapatkan penyelesaian.

- 9 Pada LAK terdapat Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) yang tidak bulat (sampai pada pecahan rupiah) sebesar Rp. 1.408.139.852,-,- Realisasi tersebut sampai pecahan rupiah dikarenakan terdapat potongan pada penerbitan SP2D pada Satker Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dengan rincian :

No	BAES I Kd Satker	Akun dan Nilai Potongan SPM	Ket
1	006.01. 650311 Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung	akun 511151 Rp. 4.050.148,-	SP2D No.597586D tanggal 04-06-2014

KPPN Pangkalpinang telah menerbitkan Nota Dinas kepada Satker bersangkutan guna konfirmasi atas hal tersebut, namun hingga saat ini belum mendapatkan penyelesaian.

- 10 Sisa Uang Persediaan per tanggal 1 Januari 2014 sebesar Rp.1.007.998.192,- . Yang terdiri dari sisa UP TA 2013 dan sisa UP tahun anggaran sebelumnya yang belum terselesaikan dengan penjelasan :

No	Kode BAES 1 SATKER	Sisa UP Rp.	KETERANGAN
1	Terlampir	657.998.192	Total setoran sisa UP TA 2013 yang disetor di TA 2014 (terlampir)
2	023.12 309005 LPMP Kep. Babel	350.000.000	Sisa UP TA 2010 . Uang tersebut dicuri dan hingga saat laporan ini dibuat masih dalam proses hukum dan menunggu penyelesaian lebih lanjut.
	Jumlah	1.007.998.192	

- 11 Pada Validasi II pengecekan Uang Makan terdapat validasi merah karena masih adanya SPM uang Makan PNS TNI/Polri dalam pecahan rupiah dengan rincian :

No	BAES I Kd Satker	Akun dan Nilai	Ket
1	060. 01. 655298 Polres Pangkalpinang	akun 511179 Rp. 6.811.450,-	SP2D No.587295D tanggal 27-02-2014

KPPN Pangkalpinang telah menerbitkan Nota Dinas kepada Satker bersangkutan namun kesalahan tersebut tidak dapat dilakukan ralat SPM karena akan merubah nilai SPM tersebut. Dengan diterbitkannya Nota Dinas tersebut diharapkan satuan kerja tidak mengulangi kesalahan tersebut

- 12 Pada aplikasi Vera bagian validasi III masih terdapat validasi merah yakni pada validasi :
- Validasi kode kegiatan yang tidak ada pada referensi aplikasi
 - Validasi kode BA-ES kegiatan yang tidak ada pada referensi aplikasi
 - Validasi kode output yang tidak ada pada referensi aplikasi

Hal tersebut diakibatkan oleh belum lengkapnya referensi yang ada pada aplikasi, sementara pengkodean atas hal dimaksud telah dipergunakan dalam DIPA TA 2014 (Terlampir)

Dimohon agar referensi aplikasi dapat segera di update agar tidak lagi terdapat validasi merah akan hal tersebut.

- 13 Jumlah Volume penerbitan SP2d oleh KPPN Pangkalpinang sampai dengan 31 Juli 2014 (termasuk satker Kuasa BUN) sebanyak :

Januari	600 buah	Juli	4.174 buah
Februari	1.695 buah	Agustus	- buah
Maret	2.731 buah	September	- buah
April	3.357 buah	Oktober	- buah
Mei	3.489 buah	November	- buah
Juni	3.356 buah	Desember	- buah

Hal tersebut menunjukkan peningkatan volume SP2D yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Kota Pangkalpinang pada khususnya dan Pulau Bangka pada umumnya.

- 14 Sampai dengan batas waktu rekonsiliasi bulan Mei 2014 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 yakni sampai dengan tanggal 09 Mei 2014 , dari 280 satuan kerja di wilayah Kuasa BUN-D KPPN Pangkal Pinang, 280 satker telah melaksanakan rekonsiliasi tepat waktu dengan KPPN (100 %)

- 15 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara mempunyai manfaat yang sangat penting bagi Kuasa BUN/KPPN, yaitu :
 - a. Alat monitoring rekening Satker di wilayah kerja KPPN
 - b. Alat monitoring keadaan kas di Bendahara yang sebenarnya
 - c. Alat penguji/rekonsiliasi atas pembukuan yang dilakukan KPPN dengan Bendahara
 - d. Bahan analisis untuk melaksanakan pembinaan kepada Bendahara

Berdasarkan PMK No. 162/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satker dan Perdirjen No. PER-3/PB/2014 tentang petunjuk pelaksanaan penatausahaan dan penyusunan LPJ bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satker disebutkan bahwa atas keterlambatan penyampaian LPJ dikenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM-GUP/SPM-TUP dan SPM LS

SISTEM AKUNTANSI KAS UMUM NEGARA
NERACA TINGKAT KPPN
PER TANGGAL 31 JULI 2014

Kd Lap : NKUNKB
Tanggal : 12-08-14
Halaman : 1
Prog ID : lu_nrck.frx

KPPN : 015 PANGKAL PINANG

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Rekening Kas di KPPN	26,740,260,510
Kas dalam Transito	357,199,822,337
Kas di Bendahara Pengeluaran	27,503,862,301
JUMLAH ASET LANCAR	411,443,945,148
JUMLAH ASET	411,443,945,148
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	68,606,211,043
Utang kepada Pihak Ketiga	778,286,005
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	69,384,497,048
JUMLAH KEWAJIBAN	69,384,497,048
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
SAL	15,683,652,327
SILPA	326,375,795,773
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	342,059,448,100
JUMLAH EKUITAS DANA	342,059,448,100
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	411,443,945,148

SISTEM AKUNTANSI UMUM
NERACA TINGKAT KPPN
PER TANGGAL 31 JULI 2014

Kd Lap : NSAUSGB
Tanggal : 12-08-14
Halaman : 1
Prog ID : lu_nrck.frx

KPPN : 015 PANGKAL PINANG

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	27,503,862,301
JUMLAH ASET LANCAR	27,503,862,301
ASET TETAP	
Tanah Sebelum Disesuaikan	142,000,000
Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan	10,338,682,341
Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan	14,858,015,762
Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebelum Disesuaikan	204,484,435,167
JUMLAH ASET TETAP	229,823,133,270
JUMLAH ASET	257,326,995,571
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Uang Muka dari KPPN	27,503,862,301
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	27,503,862,301
JUMLAH KEWAJIBAN	27,503,862,301
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	229,823,133,270
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	229,823,133,270
JUMLAH EKUITAS DANA	229,823,133,270
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	257,326,995,571

SISTEM AKUNTANSI UMUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN BERSIH (GABUNGAN)
UNTUK TANGGAL YANG BERAKHIR 31 JULI 2014
(dalam rupiah)

Kd Lap :
Tanggal : 12-08-14
Halaman : 1
Prog ID : luv_biya.frx

KPPN : 015 PANGKAL PINANG

KODE	URAIAN	DIPA	REALISASI	REALISASI DIATAS(DIBAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3
7	<u>PEMBIAYAAN</u>	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

Sistem Akuntansi Umum
DAFTAR RINCIAN KAS LAINNYA DI K/L DARI HIBAH
Tanggal 31 JULI 2014
(Dalam Rupiah)

Kd Lap : RNRCBLH
Tanggal : 12-08-14
Halaman : 1
Prog ID : luv_biya.frx

KPPN : 015 PANGKAL PINANG

No	BAES1	SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	.		TIDAK ADA DATA	0
			JUMLAH KAS BLU BA	0
			JUMLAH	0

Sistem Akuntansi Umum
DAFTAR RINCIAN KAS BLU
Tanggal 31 JULI 2014
(Dalam Rupiah)

Kd Lap : RNRCBLU
Tanggal : 12-08-14
Halaman : 1
Prog ID : luv_biya.frx

KPPN : 015 PANGKAL PINANG

No	BAES1	SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	.		TIDAK ADA DATA JUMLAH KAS BLU BA	0 0
			JUMLAH	0

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Pangkal Pinang
Jl. Kejaksaan No. 16, Pangkal Pinang